

Al-Jawwab Tentang Aceh & Kashgar

Oleh Mehmet Özay

...al-Jawwab sebagai alat komunikasi yang ampuh di antara negara-negara Muslim, dan dianggap sebagai sumber yang penting karena berbagai alasan oleh berbagai orang di berbagai wilayah geografis

Bagaimana hubungan antara Aceh dan Kashgar? Pertanyaan ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk merekonstruksi perkembangan antara Negara Ottoman dan negara-negara Muslim lainnya termasuk Aceh dan Kashgar, khususnya pada dekade terakhir abad ke-19. Sebelum menanggapi pertanyaan ini, akan bermakna untuk memberi tahu Anda tentang kondisi selama periode itu.

Menghadapi Kenyataan

Tanpa berlebihan, abad ke-19 merupakan abad yang penting dalam konteks pergolakan sosial dan politik di dunia Muslim, mulai dari Afrika Utara hingga Kepulauan Timur (Hindia Timur), yaitu Kepulauan Melayu. Masa sulit bagi negara-negara Muslim di seluruh dunia ini memicu sejumlah pemikiran untuk bekerja sama di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, para penguasa Muslim menanggapi kebutuhan saat itu dengan mengorganisir utusan dan bertukar surat dengan negara-negara Muslim terkait. Utusan dari Asia Tengah, Kepulauan Melayu, Afrika Utara mengunjungi Istanbul dan Kota Negara Ottoman. Selain itu, mereka bertukar juga memainkan peran yang sangat penting.

Melalui kebijakan ini, para penguasa Muslim memiliki kepentingan yang kuat untuk menginformasikan tentang kondisi politik mereka yang memburuk saat mereka menghadapi usaha-usaha kolonial Barat. Dalam hal ini, Negara Ottoman adalah kekuatan yang ditargetkan yang dianggap memberikan bantuan yang diperlukan kepada negara-negara Muslim yang merasakan tekanan yang semakin besar dari kehadiran kolonial di geografis masing-masing.

Tujuan mendasar bersama dari usaha-usaha politik ini adalah untuk menciptakan kerja sama politik yang lebih dekat dan lebih kuat untuk mengatasi kondisi kolonial yang semakin terasa di masing-masing wilayah Muslim (Dar' al Islam).

Dari Aceh dan Kashgar

Negara-negara Muslim, seperti Aceh dan Jember dari Hindia Timur atau Kashgar dan Bukhara dari Asia Tengah, yang dianggap sebagai pinggirannya, mengirim duta besar mereka ke pusat. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa pusat mengacu pada Istanbul, ibu kota Negara Ottoman.

Bagas Muslim lain di pinggirannya menganggap Negara Ottoman merupakan pemimpin agama dari kekuatan politik

yang unggul dalam menyelesaikan masalah mereka. Meskipun demikian, tanpa terjebak dalam ilusi, harus diingat bahwa Negara Ottoman juga berada di bawah tekanan politik dan ekonomi tertentu dari kekuatan-kekuatan Eropa pada periode yang sama, meskipun tidak dijajah.

Dalam konteks ini, saya dengan tegas berpendapat bahwa para duta besar dari berbagai negara pinggirannya yang disebutkan di atas, selama pertemuan mereka dengan para petinggi di Istanbul, mengorganisir bahwa para penguasa, yaitu Abdülmejid (1839-1861), Abdülaziz (1861-1876), dan Abdülhamit II (1876-1909) harus memainkan tanggung jawab keagamaan dan politik mereka sebagai pemimpin global negara-negara Muslim.

Di samping itu, Negara Ottoman juga merasakan perubahan arah epistemologi politik mereka melalui periode reformasi Tanzimat. Artinya, meskipun otoritas kekhilafahan dapat dihidupkan kembali dalam beberapa atau sebagian besar, para penguasa Ottoman tidak dapat bergerak maju karena hambatan yang diciptakan oleh kekuatan Eropa. Juga patut dipertanyakan apakah para utusan negara-negara Muslim di Istanbul merasakan di mana atau frustrasi ketika mereka mengamati realitas di pusat, yaitu Istanbul.

Media Cetak: Sebuah Alat

Salah satu perkembangan penting selama beberapa dekade terakhir abad ke-19 adalah munculnya media cetak secara signifikan. Media cetak merupakan alat baru untuk mengembangkan komunikasi dan korespondensi di antara negara-negara Muslim.

Tidak diragukan lagi bahwa berbagai versi media cetak memainkan peran yang inovatif dan penting dengan menebarkan dokumen-dokumen relevansi yang disediakan oleh masing-masing duta besar negara-negara Muslim yang berada di bawah pendudukan atau merasakan ancaman perluasan kekuatan kolonial di berbagai geografis.

Misalnya, al-Jawwab, surat kabar berbahasa Arab yang merupakan gagasan Ahmad Faris al-Shidyq (1804-1887), pemilik dan editor surat kabar terkenal ini, kini menjadi sumber sejarah penting untuk memahami dan menelusuri perkembangan internasional.

Tidak diragukan lagi bahwa al-Jawwab memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan intelektual kalangan Muslim terpelajar dan memberi tahu mereka tentang urusan politik dan perubahan di Eropa. Selain itu, surat kabar

ini menginformasikan tentang urusan Muslim di berbagai geografis, dari Maroko dan Mesir hingga India dan Kepulauan Melayu, selama beberapa dekade terakhir abad ke-19.

Diketahui bahwa al-Shidyq juga berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan para pemimpin masyarakat Muslim dari wilayah-wilayah Muslim yang disebutkan di atas. Selama berkomunikasi, ia menerima dokumen-dokumen dari orang-orang tertentu untuk dipublikasikan di al-Jawwab.

Dokumen-dokumen tersebut diyakini telah merefleksikan kondisi dan perkembangan politik di berbagai masyarakat Muslim. Itulah sebabnya al-Jawwab secara bertahap beredar luas dari tahun 1861 hingga 1865. Hal ini menjadikan al-Jawwab sebagai alat komunikasi yang ampuh di antara negara-negara Muslim, dan dianggap sebagai sumber yang penting karena berbagai alasan oleh berbagai orang di berbagai wilayah geografis.

Al-Zahid & Utusan Kashgari

Sementara Ahmad Faris, sebagai redaktur al-Jawwab, memiliki informasi pribadi tentang beberapa perkembangan di Aceh yang mungkin dianggap sebagai kekuatan representatif Kepulauan Melayu pada dekade tersebut, informasinya adalah Abd al-Rahman al-Zahir, yang dikenal dan disebutkan dalam sumber-sumber Ottoman sebagai "al-Mutasarrif al-Muraja' Mahanaja Mudabbir al-Malik al-Sayyid Abd al-Rahman al-Zahir", seorang utusan Sultan Mansur Syah (1837-1870), yang saat itu adalah sultan Aceh. Saya tidak akan mengulang visi dan misinya di sini karena saya telah merefleksikan peran al-Zahir di artikel sebelumnya. Namun, menariknya, utusan politik lain dari Asia Tengah, seperti Kashgar, memiliki tugas dan tujuan yang sama dengan al-Zahir.

Dari dalam kaitan ini, kita mengetahui realitas di Aceh pada dekade akhir abad ke-19. Secara historis, apa yang diketahui pada akhir abad ke-19 adalah tentang Perang Belanda di ujung utara pulau Sumatera. Alasan kolonial yang serupa, yakni invasi Kekaisaran Rusia ke wilayah Muslim Asia Tengah, yakni Bukhara, Yarkand, Kashgar, dan lain-lain, menyebabkan terjadinya mobilisasi politik bangsa-bangsa Muslim yang sebagian besar berasal dari Turki dan mengirimkan utusan mereka ke Istanbul untuk memperoleh berbagai macam bantuan dari Negara Ottoman guna melawan ekspansi kolonial Rusia. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kashgar. Pertama, kita mendengar nama Kashgar dalam kasus Aceh di al-Jawwab ("al-Jawwab, 18 June 1873, No. 644, 2; "al-Jawwab, 4 June 1873, No. 641, 1).

Pengutusan kolonial Belanda menyiratkan perkembangan ini ke Nusantara melalui saluran mereka. Sumber-sumber Belanda memberi tahu kita tentang hubungan antara Aceh dan Kashgar, tetapi secara tidak langsung... Memang, mereka menerbitkan berita dari al-Jawwab. Mereka memberi tahu bahwa Sultan Ottoman tidak menerima al-Zahir sebagai

utusan Aceh, tetapi menerima utusan Kashgar dalam waktu yang sangat singkat...

Abd al-Rahman al-Zahir yang dipukul sebagai Perdana Menteri atau "Maharaja Mudabbir" ul Malik, ("menteri dalam negeri pemerintahan Aceh" dan "wakil mutlak" Sultan Aceh) berangkat dari Penang menuju Istanbul sesaat sebelum pecahnya Perang Belanda di Aceh. Peristiwa ini terjadi pada musim semi tahun 1872. Setelah menunaikan ibadah haji di Arabia dan berkomunikasi dengan para pemimpin politik Aceh di Penang, ia tiba di Istanbul pada bulan April 1873.

Tujuan utama al-Zahir adalah untuk memperoleh pengakuan politik dan kerja sama dari para penguasa Ottoman dalam memerangi invasi Belanda ke wilayah Aceh. Untuk mewujudkan tujuan politiknya, al-Zahir berhasil bertemu dengan Wazir Agung dan menyerahkan sepucuk surat dari Sultan Mansur Syah. Respons apa yang diterima al-Zahir masih harus dicari tahu?

Akan tetapi, tidak ada catatan resmi tentang apakah penguasa Ottoman secara resmi menampung al-Zahir atau tidak. Terkait hal ini, dapat dipastikan bahwa ia tinggal di Istanbul untuk membiayai pengeluarannya. Akan tetapi, sebagaimana diketahui sejak abad ke-16, duta besar asing di Istanbul diterima dengan baik, dan negara Ottoman membiayai pengeluaran mereka.

Berdasarkan data yang tersedia, Al-Zahir tinggal -setidaknya- selama beberapa waktu di Özbek Tekkesi yang dikenal sebagai pondok Sufi di Uluçbagian Anatolia di Istanbul. Saya pikir kontak-kontaknya pastilah di antara orang-orang Arab. Sebab, semakin intelektual, pedagang, dan petatis Arab yang menetap dan menciptakan komunitas Arab yang kuat di Istanbul selama tahun 1860-an dan 1870-an.

Selamatan-tahun ini, selain itu, seperti al-Zahir dari Kepulauan Melayu ke Istanbul, ada beberapa bangsa lain, terutama dari Turki Asia Tengah, yang terus-menerus mengunjungi Sütlüme Porte. Alasan utamanya sama: intervensi dan serangan perajajah di wilayah mayoritas Muslim. Diketahui juga bahwa beberapa utusan individu dari Asia Tengah menjadi tuan rumah bagi pondok-pondok Sufi, seperti Özbekler Tekkesi.

Dapat dimengerti bahwa baik al-Zahir maupun al-Shidyq menyadari kehadiran utusan dari Kashgar. Meskipun utusan Kashgari dari Asia Tengah tiba di Istanbul setelah al-Zahir, utusan itu diterima oleh Sultan pada minggu terakhir bulan Mei 1873. Hal ini pasti menyebabkan kekecewaan tertentu bagi al-Zahir (al-Jawwab, 4 Juni 1873, No. 641, 1). Karena al-Jawwab tidak memberi tahu kita apa pun tentang apakah al-Zahir secara resmi diterima oleh Abdülaziz atau tidak.

Penulis adalah Profesor Madya Di 'Institut Internasional Penelitian Dan Peradaban Islam' (IISTAC), Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM).